

beliau pada awalnya nama *Tempek* bermula dari adanya seekor kuda terbang yang biasa di tunggangi oleh *Joko Toleh* di saat beliau menyebarkan agama islam dan berdakwah di sekitar kabupaten sumenep. Ketika beliau dan kuda terbang tersebut berada di atas gunung kel sampih tiba-tiba kuda tersebut terjatuh di utara gunung *kel sampih*.

Namun kebetulan ditempat tersebut ada seekor anak sapi dalam bahasa maduranya *empek* (anak sapi) dan disebelah barat sapi tersebut terdapat batu besar, kuda tersebut terjatuh ditempat itu dan kaki depannya mengenai *empek* dan kaki belakangnya mengenai batu besar tersebut. Dengan peristiwa itulah desa tersebut dinamakan desa *Tempek* . Tetapi tak lama kemudian nama *Tempek* tersebut dinilai kurang baik oleh pemerintah desa *Tempek* yang kebetulan pada saat itu. Pegawai desa mayoritas keturunan orang jawa dan dalam pribahasa mereka nama *Tempek* tersebut memiliki arti kemaluan seorang wanita, maka dengan itulah mereka mengadakan musyawarah dibalai desa, pada musyawarah saat itulah banyak yang mengusulkan khususnya pemerintah yang keturunan jawa. Mereka menyatakan bahwa nama *Tempek* tersebut kurang baik.

Setelah beberapa tahun kemudian terjadi peristiwa seorang putri raja sumenep yang bernama *Potreh Koneng*, ia memetik sebuah bunga yang bernama bunga sareh. Tetapi setelah bunga tersebut dipetik terjatuh kedalam sungai yang bertempat di desa benasareh lalu bunga tersebut ikut arus air sungai sampai ke sungai desa *Tempek* . Setelah bunga itu sampai

d. Pendidikan

Masyarakat Desa Tambak Sari mayoritas hanya lulusan SLTP. Sehingga untuk menjadi tenaga ahli atau pegawai yang dapat bekerja sesuai keahliannya sangat tidak memungkinkan. Dengan hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6.1

Pendidikan		
Tingkat pendidikan	Jumlah	Keterangan
Buta aksara	629	Orang
Putus sekolah	294	-
Belum sekolah	112	-
Sekolah RA	94	-
Belum tamat SD	241	-
Tamat SD	820	-
Tamat SLTP	54	-
Tamat SLTA	24	-
Belum tamat SLTP	29	-
Belum Tamat SLTA	21	-
Selesai S1	17	-
Selesai S2	4	-
Selesai S3	1	-
PNS	7	-
Jumlah	2347	-

Sumber : Catatan Sekretaris Desa Tambak Sari Kec. Rubaru, yang didasarkan pada data profil Desa tahun 2011

e. Agama Atau Aliran

Masyarakat Desa Tambak Sari rata-rata beragama islam. Ideologi ke NU an masyarakat Desa Tambak Sari sangat kental sekali. Kecuali warga yang bearada di dusun peangan, di dusun tersebut ada kelompok yang bernama aliran wahidiyah. Masyarakat yang tergabung kedalam aliran tersebut jumlahnya sekitar 33 orang. Dalam kegiatan aliran

Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-2008) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Realisasi Program Raskin selama 2005-2009 berkisar antara 1,6 juta ton-3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, Program Raskin bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Program Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000-5.500/kg.

Dampak Program Raskin terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat Program Raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006=11 bulan dan tahun 2007=10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Pada saat itulah, pemerintah melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan Beras Pemerintah (OPK-CBP).

sudah banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan dana APBD-nya untuk Program Raskin .

Apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota patut diberikan karena perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawasan terhadap pelaksanaan Program Raskin . Kepedulian terhadap Program Raskin berarti kepedulian terhadap RTS yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa Program Raskin merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran 18,5 juta RTS (pada tahun 2009), perlu terus ditumbuhkan.

Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui Wardes, penyaluran Program Raskin menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai dengan ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009.

Melalui Wardes, sistem administrasi distribusi Program Raskin juga yang dituangkan dalam Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM1), pembagian kartu Program Raskin , dan realisasi penerimaan beras oleh RTS dapat diperbaiki mulai dari awal. Juga dimungkinkan dapat

Gambar. 7.7



Data yang telah diungkapkan Bapak Masra tersebut menunjukkan bahwa pada tahap implementasi pendistribusian Program Raskin terlihat “tidak efektif”. Pada ketidak efektifan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini menandakan adanya rakyat yang tidak miskin yang justru mendapatkan bantuan beras Raskin sedangkan Rakyat miskin, justru tidak mendapatkan bantuan beras Raskin. Hal itu menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian Program Raskin di Desa Tambak Sari ini tidak terlaksana dengan baik.

Kemudian implementasi Program Raskin yang tidak efektif salah satunya terkait dengan implementasi pendistribusiannya tidak menentu. Program Raskin yang semestinya didistribusikan setiap bulan kepada Rakyat miskin, hanya saja Rakyat miskin mendapatkan tiga kali mulai dicanangkannya Program Raskin. Setelah itu Rakyat miskin tidak mendapatkan lagi sampai sekarang. Untuk membuktikan ketidak efektifan

pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, ukuran kemiskinan besar dan kecil. Ukuran besar kemiskinan biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah, sedangkan ukuran kecil kemiskinan dibutuhkan untuk sasaran rumah tangga/keluarga.

c. Problem Sosial Dalam Implementasi Pendistribusian Program Raskin

Dari hasil perolehan data di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program raskin menimbulkan berbagai persoalan pada masyarakat seperti yang tercantum dibawah ini:

Pertama, proses pendataan Rakyat miskin (RM) tidak dilaksanakan dengan ketentuan umum Program Raskin atau tidak dilaksanakan dengan baik. *Kedua*, Pentargetan di tingkat RT RW menunjukkan ketepatan sasaran yang bervariasi. Adanya bukti bahwa pendaftaran Rakyat miskin susulan tidak ada. *Ketiga*, proses penentuan Rakyat miskin tidak dilakukan dengan tegas. *Keempat*, tidak adanya pendataan konsensus rakyat. *Kelima*, tidak adanya kartu tanda miskin. *Keenam*, prosedur penyaringan Rakyat miskin (RM) tidak dilakukan dengan seksama.

Kepentingan kelompok sasaran tidak diakomodir dengan baik. Sehingga Rakyat miskin mengalami kekecewaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Asmuni selaku RT 12.

Ini adalah sapi-sapi yang sedang disuntik, upaya untuk cepat hamil dan nafsu makan, masyarakat juga ikut serta membantu memegang sapinya supaya sapi yang disuntik tidak lari dan ngamuk pada penyuntiknya.

Kemudian pemetaan kemiskinan, baik yang dihasilkan oleh BPK untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan Desa atau Kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan kecil, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu kriteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi siapa dan bagaimana orang miskin.

Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga. Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Namun pada tahun 2008, untuk penentuan sasaran penerima Program Raskin digunakan kriteria miskin dari Badan Pusat Konsensus (BPK) yang ditentukan dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan dan didasarkan pada kerangka kerja kontekstual, yang berarti variabel kemiskinan untuk tiap Kabupaten atau Kota tidak selalu sama. Tetapi pendataan Rakyat miskin disini mulai tahun 2007 tidak pernah ada yang namanya penentuan Rakyat miskin yang mengacu pada hasil pendataan BKKBN dan dari

Dari hasil penelitian, kebijakan Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program raskin. Pada kenyataannya implementasi pendistribusian program raskin tidak berpedoman penuh pada prosedur kebijakan yang ada pada ketentuan umum program raskin. Karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada pedoman umum Raskin. Penyimpangan yang sering terjadi yaitu: tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rakyat miskin (RM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap (RM) menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg/KK.

Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa kecewa. Hal itu juga dapat dibuktikan dengan adanya laporan oleh Lembaga Investigasi Hukum (LIH) Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri Sumenep, sebagaimana keterangan dari Koordinator Team Pelaporan LIH Jawa Timur Saikho As ali saat dikonfirmasi Team Independent News di ruang kerjanya mengatakan bahwa laporan tersebut dilakukan berdasarkan adanya temuan yang mengindikasikan kuat adanya penyelewengan dan pelanggaran raskin pada 15 desa di 3 Kecamatan Kabupaten Sumenep, yaitu salah satunya Kecamatan Rubaru yang meliputi Desa Tambak Sari terkena sebutan

Keadaan implementasi distribusi raskin di Desa Tambak Sari Dikorelasikan dengan teori "Fungsional Struktural". Teori ini menekankan kepada keteraturan (Order), mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan di masyarakat. Dengan menggunakan konsep-konsep utama yaitu fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan.

Teori Fungsional Struktural melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketika terjadi sedikit perubahan di masyarakat maka akan mempengaruhi elemen yang lain.

Dengan menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa atau struktur di masyarakat fungsional bagi lingkungan masyarakat. Robert K. Merton sebagai salah satu penganut teori ini mengungkapkan bahwa suatu pranata atau institusi tertentu dapat berfungsi terhadap satu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsi terhadap unit sosial yang lainnya.

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Tambak Sari terkait dengan Implementasi Program Raskin, yang lagi-lagi mengalami penyelewengan dalam implementasi distribusi Program Raskin. Hal itu disebabkan oleh adanya disfungsi struktur sosial yang ada. Disfungsi struktur tersebut seperti pengendapan beras yang dilakukan oleh aparat tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dan berupaya masyarakat untuk tidak mengalami keresahan yang biasa dipicu oleh adanya pencurian atau

bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian yang lainnya.

Bagi Sanderson, setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis kerana bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara aksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Sehingga eksistensi suatu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat didefinisikan.⁷¹ Salah satu teori yang diterapkan dalam pemahaman fungsionalisme struktural adalah teori konsensus. Teori Konsensus memandang nilai dan norma sebagai landasan masyarakat, memusatkan perhatiannya pada keteraturan sosial berdasarkan atas kesepakatan diam-diam dan memandang perubahan sosial terjadi secara lambat.

Perilaku-perilaku menyimpang dimasyarakat dalam pandangan teori struktural fungsional sebagai suatu bentuk anomali dalam struktur sosial. Disfungsi yang ada dimasyarakat dipahami oleh Robert K. Merton sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga keteraturan harus siap dengan ketidak teraturan yang dianggap sebagai struktur yang teratur karena berkaitan dengan peran dimasyarakat.⁷² Disinilah pemahaman teori konsensus berperan dalam struktural fungsional, karena menitik beratkan pada keteraturan di masyarakat.

⁷¹ Nazsrollah Nazsir. *Teori-teori Sosiologi*, (Padjajaran: Widya Padjajaran, 2008). hal. 9-10

⁷² Mizan, "*Fungsionalisme Struktural*", Online Jurnal, 2010-2012: (<http://www.forum.sains.com/artiklel/fungsionalisme-struktural/html>). diakses 11 Februari 2012

Dalam menyikapi adanya problem sosial masyarakat melakukan upaya agar kondisi difungsi kembali kepada keteraturan. Implementasi dan distribusi program raskin yang ada di Desa Tambak Sari menjadi suatu problem sosial. Terdapat peran fungsi dan difungsi dalam implementasi dan distribusi Program Raskin tersebut.

Implementasi dan distribusi Program Raskin yang dianggap sebagai suatu bentuk penyebab terjadinya problem sosial selain memberikan fungsi bagi pihak-pihak tertentu juga menjadi suatu difungsi bagi masyarakat. Adanya oknum-oknum tertentu yang merasa diuntungkan dengan adanya program raskin di Desa Tambak Sari dan menjadikan fungsional bagi pihak-pihak tertentu dalam struktur masyarakat.

Sehingga dalam menanggapi problem sosial tersebut masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial tersebut. Dengan terus mengedepankan keteraturan yang ada di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya perubahan yang dilakukan untuk menjadikan lingkungan kembali teratur berlangsung perlahan dan terkesan lambat. Struktur birokrasi memberi tekanan terhadap individu sehingga mereka menjadi disiplin, bijaksana.

Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus kepada kepatuhan mengikuti peraturan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa aturan-aturan itu pada mulanya dibuat. Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efisiensi organisasi,

